



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO BUDI SETYAWAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3. NHK : 814118

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m²/495 m² di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 2150 m² di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 1850 m² di KAB / KOTA SRAGEN, WARISAN Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA SRAGEN, WARISAN Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 608.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU PICK-UP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, HONDA NIAGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 41.500.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.799.500.000



III. HUTANG

Rp. 216.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.583.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.